# BAB I

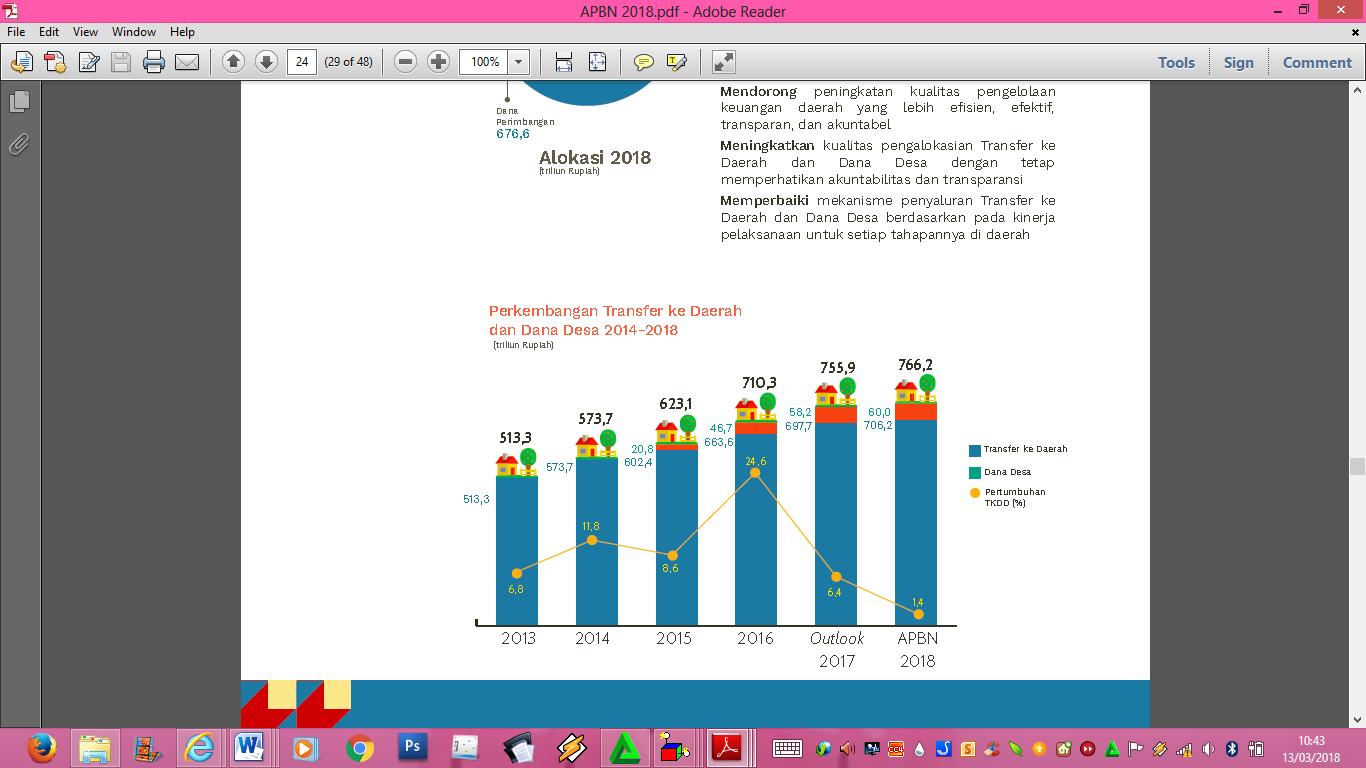
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 15 Januari 2014 undang-undang desa resmi disahkan dengan ditandatanganinya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kelahiran UU tersebut menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar yang diharapkan membawa perubahan-perubahan penting yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa sehingga diharapkan tidak ada lagi desa yang tertinggal.

Undang-undang desa yang resmi disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut memuat bahwa desa akan mendapatkan dana miliyaran rupiah secara langsung. Dana miliyaran tersebut merupakan kebijakan tentang dana desa yang telah diberlakukan sejak tahun 2015 lalu. Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan untuk desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Buku Informasi APBN TA 2018 dijelaskan bahwa kebijakan Dana Desa ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah antara pusat dan daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah, dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

Dana Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya memiliki nilai nominal yang sangat besar bahkan mencapai angka triliun. Jumlah anggaran dana desa dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1.1.



*Sumber: Informasi APBN 2018*

**Gambar 1.1**

**Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2014-2018**

Berdasarkan grafik (gambar 1) dapat dilihat bahwa jumlah dana desa yang dianggarkan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 saat ini. Berikut ini rincian alokasi anggaran dana desa dari tahun 2015 hingga tahun 2018.

**Tabel 1.1**

**Anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Anggaran Dana Desa** | **Rata-rata alokasi anggaran** | **Jumlah Penerima Desa** |
| 2015 | Rp20,8 triliun | Rp280 juta/desa | 74.093 desa |
| 2016 | Rp46,7 triliun | Rp628 juga/desa | 74.754 desa |
| 2017 | Rp58,2 triliun | Rp800 juta/desa | 74.954 desa |
| 2018 | Rp60 triliun | Rp800 juta/desa | 74.958 desa |

*Sumber: Buku Pintar Dana Desa*

Anggaran Dana Desa yang besar ini dinilai rawan korupsi. Regulasi yang relatif baru, kompetensi pemerintah desa yang lemah, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dalam memanfaatkan anggaran diduga berpotensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa. Demi terhindar dari resiko terjadinya penyelewengan, penyimpangan dan korupsi diperlukan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Keuangan Desa yang dikelola harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun Anggaran 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Tribun Sumsel, Mei 2018). Opini WTP ini merupakan pencapaian ketujuh kali secara berturut-turut sejak tahun 2010. Menurut BPK Provinsi Sumatera Selatan, laporan keuangan kabupaten OKI telah memperhatikan banyak sisi yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan Pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan berdasarkan Undang-Undangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undangan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan peraturan yang terkait lainnya. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan yang baik.

Di tahun 2017 Kecamatan Pampangan merupakan salah satu kecamatan dari tiga kecamatan di Kabupaten OKI yang menerima dana desa lebih besar dari tahun sebelumnya dan bahkan lebih besar daripada belanja dinas di kabupaten. Hal ini diungkapkan oleh H. Iskandar, S.E selaku Bupati Ogan Komering Ilir. Kecamatan Pampangan merupakan kecamatan tertua di Kabupaten OKI yang terdiri dari 22 desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala desa di Kecamatan Pampangan pada Februari 2018 diketahui bahwa dana desa yang diterima selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis (Februari, 2018) maka diketahui bahwa dana desa yang diterima oleh masing-masing desa telah direalisasikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan diketahui bahwa dana telah digunakan dengan optimal untuk membangun infrastruktur desa yang bermanfaat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti digunakan untuk perbaikan jalan utama kecamatan pampangan, jalan titin bertiang pembuatan sumur bor, WC, MCK, pembangunan PAUD, jembatan, los pasar, dan digunakan juga untuk insentif guru PAUD. dan dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Pampangan tergolong baik. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berikut data nama desa dan jumlah dana desa yang diterima masing-masing desa pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**

**Penerimaan Dana Desa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Desa** | **Tahun 2017** |
| 1 | Ulak Kemang | Rp972.298.000 |
| 2 | Ulak Kemang Baru | Rp988.936.000 |
| 3 | Sepang | Rp864.215.000 |
| 4 | Keman | Rp832.750.000 |
| 5 | Keman Baru | Rp1.056.870.000 |
| 6 | Ulak Pianggu | Rp836.258.000 |
| 7 | Kandis | Rp873.385.000 |
| 8 | Ulak Depati | Rp782.765.000 |
| 9 | Tapus | Rp932.990.000 |
| 10 | Pulau Layang | Rp804.436.000 |
| 11 | Kuro | Rp835.166.000 |
| 12 | Bangsal | Rp786.092.000 |
| 13 | Pulau Betung | Rp931.295.000 |
| 14 | Pampangan | Rp832.593.000 |
| 15 | Menggeris | Rp793.455.000 |
| 16 | Serimenang | Rp815.315.000 |
| 17 | Srimulya | Rp879.995.000 |
| 18 | Secondong | Rp811.253.000 |
| 19 | Serdang | Rp813.887.000 |
| 20 | Jermun | Rp794.498.000 |
| 21 | Tanjung Kemang | Rp797.394.000 |
| 22 | Jungkal | Rp825.175.000 |

*Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017*

Anggaran dana desa yang diperoleh tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat dan bupati/walikota sesuai ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik (*Good Village Governance*). Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintahan desa yang mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan bahwa pemerintahan tersebut memiliki kinerja yang baik. Berkaitan dengan kebijakan dana desa.

Salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Ketentuan mengenai Perdesaan telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 telah mengatur kententuan mengenai pengelolaan dana desa yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.. Sedangkan Dana Desa sendiri telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan pertanggungjawaban juga disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Seluruh Pemerintah Desa harus patuh dan berpedoman terhadap peraturan-peraturan tersebut demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Permasalahannya ialah Peraturan Perundang-Undangan terkait dana desa ini masih tergolong baru disahkan dan diundangkan, sedangkan pelaksanaannya harus disegerakan. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah desa belum sepenuhnya memahami peraturan terkait dana desa ini.

Selain itu, demi mewujudkan akuntabilitas dan pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa juga harus memahami proses pengelolaan dana desa dengan baik. Namun di sisi lain timbul risiko pengelolaan keuangan desa yang disebabkan lemahnya kemampuan pemerintah desa selaku pengelola dana desa. Kompetensi pemerintah desa tidak hanya diukur dengan peningkatan pendidikan saja, tapi juga dapat diukur melalui pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*), sikap (*attitude*), peningkatan motivasi dan pengalaman kerja. Kepala desa dan perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan yang beraneka ragam memungkinkan pemerintah desa tersebut tidak memahami bidang yang akan dijalaninya sebagai profesi pemerintah desa secara keseluruhan terkait dengan dana desa dan sistem pelaporan keuangan dana desa. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan cara pemilihan demokrasi dimana calon yang mendapat suara terbanyak yang akan terpilih menjadi kepala desa. Begitupun dengan pemerintah desa yang lainnya yaitu bendahara dan sekretaris dapat terpilih asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014. Hal ini menimbulkan pertanyaan serta isu terkait kemampuan para pemerintah desa apakah mereka mampu mengelola dana desa tersebut sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Mengingat sejak diterbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 maka pemerintah desa memiliki wewenang menyelenggarakan pengelolaan dana desa secara menyeluruh tanpa ada intervensi dari pihak luar. Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra terkait kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang sesuai harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku

Dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Masyarakat desa sebagai pemilik desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat juga dapat memantau langsung jalannya pemerintah desa. Dari pantauan tersebut, jika ada yang kurang tepat, maka dapat langsung dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu masyarakat desa dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Terlibatnya masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membuat masyarakat lebih memahami rencana dari pemerintah desa itu sendiri sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan masyarakat desa tidak menyalahkan pemerintah desa terhadap keputusan yang diambil. Selain itu, masyarakat desa dilibatkan dalam mengusulkan Program Rencana Pembangunan untuk lebih mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dan menjadi prioritas untuk penggunaan dana desa. Hal inilah yang ingin diketahui penulis apakah masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dana desa ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh kepatuhan terhadap perundang-undangan, kompetensi Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan atas Perundang-undangan, Kompetensi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI)”.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah ada pengaruh kepatuhan atas perundang-undangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI secara parsial?
2. Apakah ada pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI secara parsial?
3. Apakah ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI secara parsial?
4. Apakah ada pengaruh kepatuhan atas perundang-undangan, kompetensi Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI secara simultan?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhi tetapi penulis hanya membahas mengenai faktor kepatuhan terhadap perundang-undangan, kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat. Terkait jumlah dana desa yang diterima oleh desa-desa di Kecamatan Pampangan, penulis hanya mendapatkan data dana desa untuk tahun 2017.

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1.4.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepatuhan atas perundang-undangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepatuhan atas perundang-undangan, kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan.

### 1.4.2 Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
2. Bagi mahasiswa, akuntansi sektor publik penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai informasi untuk menambah ilmu pengetahuan.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini menjadi informasi untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa yang merupakan hak dari masyarakat agar dapat melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan Pampangan.
4. Bagi penulis, menambah wawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Manfaat Praktis
6. Bagi kecamatan Pampangan, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah serta memperoleh pengelolaan dana desa yang akuntabel dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dikecamatan Pampangan.
7. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi untuk mengetahui dan menilai pengelolaan dana desa yang telah diberikan ke desa-desa.